

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perekonomian Provinsi Jambi berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 74,58 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 41,97 triliun. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,83 persen (y-on-y), dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,33 persen, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,10 persen. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 2,42 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,18 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 54,71 persen. Pada triwulan I-2024, perekonomian semua Provinsi di Pulau Sumatera tumbuh positif (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,06 persen yang kemudian diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 5,01 persen dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,88 persen.

Pada April 2024, Provinsi Jambi mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,93 persen, dari tiga Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Jambi seluruhnya mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,09 persen dengan IHK sebesar 108,78 dan terendah terjadi di Muara Bungo sebesar 3,18 persen dengan IHK sebesar 105,98. Sementara secara inflasi m-to-m, Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,18 persen, dimana dua kabupaten/kota mengalami inflasi, dan satu kota deflasi. Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi m-to-m, yaitu Kabupaten Kerinci sebesar 0,97 persen dan Muara Bungo sebesar 0,08 persen, sedangkan Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,05 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 8,82 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,91 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,86 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen; kelompok Kesehatan sebesar 1,03 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,19 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 2,04 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,75 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,84 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,41 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,20 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Di Provinsi Jambi pada Bulan April 2024 mengalami inflasi sebesar 3,93% (y-on-y) dan secara 1,68% (m-to-m), penyumbang utama inflasi bulan April 2024 secara y-on-y adalah: Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil sebesar 2,67%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, bawang merah, kentang, cabai

merah, sigaret kretek mesin (SKM), dan bawang putih, jeruk, telur ayam ras, gula pasir, sigaret kretek tangan (SKT), petai, kopi bubuk, dan tomat. Kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif angkutan udara dan tarif kendaraan travel. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil sebesar 0,26%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah baju muslim wanita.

Pemantauan ketersediaan dan stabilisasi pangan dengan berakhirnya musim badai El-Nino yang beresiko pada curah hujan yang berlebihan, bahkan mengakibatkan banjir di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mendorong peningkatan harga komoditas hortikultura. Selain banjir, inflasi bisa berlanjut karena penyesuaian harga rokok akibat peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Inflasi juga diperkirakan masih terjadi seiring peningkatan permintaan komoditas angkutan udara dan bahan pangan sejalan dengan adanya beberapa momentum hari libur nasional, seperti peringatan Isra Mikraj, Tahun Baru Imlek, dan Pemilu Presiden 2024.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menindaklanjuti Perintah Bapak Presiden RI dan arahan dari Bapak Mendagri RI kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Bersama Mendagri RI, yang dilaksanakan seminggu sekali secara hybrid di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti rapat mingguan Mendagri RI secara hybrid, Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti rapat tersebut dengan mengadakan rapat lanjutan, hasil rapat lanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya konkrit guna menekan inflasi, menjaga ketersediaan bahan pokok, menjaga harga bahan pokok tidak naik dan menjaga penimbunan barang yang dilakukan oleh para pedagang dan distributor.
2. Pemerintah Daerah harus untuk melakukan operasi pasar murah dengan penuh kesungguhan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, tapi kegiatan pasar murah dilakukan secara berkelanjutan agar memiliki dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi.
3. Pemerintah Daerah memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah masing-masing. Sebab, melalui laporan IPH Pemda dapat mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
4. Pemerintah Daerah agar melakukan upaya yang optimal dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Kemendagri pada Maret 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi
5. Adapun keenam upaya konkret yang dimaksud yaitu melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Kondisi sejumlah pasokan komoditas seperti beras, jagung dan bawang merah serta meminta kepada Kepala Daerah agar mewaspadaikan potensi kenaikan harga jagung yang

dapat berdampak pada harga ayam dan telur.

7. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag Provinsi Jambi mengintervensi komoditas bahan pangan untuk dilakukan Operasi Pasar (OP) dalam Kota Jambi.
8. Adapun Pasar yang menjadi objek adalah Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar serta Pasar Bungur di Kabupaten Bungo, pasar-pasar tersebut merupakan lokasi pencacahan pedagang oleh BPS Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi memfasilitasi bantuan transportasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar tersebut.
9. Lebih mengaktifkan Peran TPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga Tim Satgas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, agar melakukan pemantauan harga pangan setiap hari untuk mengetahui informasi penyebab terjadinya kenaikan harga.
10. Agar Perangkat Daerah dan Dinas Instansi terkait agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi setiap waktu dan internal antar wilayah tetap terjaga, bila terjadi masalah segera menghubungi Bapanas RI untuk meminta solusinya segera.
11. Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Kepolisian, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam mengendalikan inflasi daerah.
12. Mengadakan MOU antar daerah Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi ketersediaan pangan.
13. Menggalakkan kembali Gerakan Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN/karyawan di semua instansi pemerintah dan BUMD/BUMN lingkup Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan pengendalian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, antara lain :

1. Pada tanggal 15 Januari 2024 Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Pasar Tani bertempat di halaman parkir Kantor Gubernur Jambi kegiatan tersebut kolaborasi dan kerjasama antara : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Perum BULOG Kanwil Jambi dan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Jambi.
2. Pada tanggal 4 Maret 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag melaksanakan Operasi Pasar berupa cabe merah sebanyak 5 ton, dan cabe rawit hijau sebanyak 5 ton.
3. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Jambi pada tanggal 7 Maret 2023 bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi dan di hadiri oleh Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Instansi Vertikal Provinsi Jambi, Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
4. Pada tanggal 11 maret 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag melaksanakan Operasi Pasar berupa 8 ton cabe merah, 4 ton cabe rawit hijau.
5. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di lokasi aston villa sebanyak 3 kali, dan Gerakan Pangan Murah berlokasi di Pendopo Kantor Gubernur Jambi yang dilaksanakan oleh Darmawanita dan BKW sebanyak 3 kali Darmawanita dan BKW.
6. Dinas Perindag Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pengendalian harga, Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi memberi arahan Rapat Koordinasi tersebut

yang dilaksanakan di Aula Kantor BPS Provinsi Jambi, yakni terkait aplikasi SI IJAL yang berencana digunakan untuk mengontrol tingkat laju inflasi di Provinsi Jambi. Dalam rapat tersebut dipaparkan isi dari aplikasi Si IJAL yang didalamnya terdapat, berbagai komoditi, lokus, pola tanam, hasil panen, distribusi dan laporan.

Selanjutnya, berdiskusi terkait aplikasi SI IJAL, adanya fokus dari hulu ke hilir, daerah mana yang fokus pada komoditi pangan. Menghitung kebutuhan perkomoditas yang bisa dari hulu ke hilir. Adanya SOP yang akan disepakati bersama dan komoditas yang perlud intervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yang diintervensi di Provinsi Jambi terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota IHK. Pada aplikasi ini harus di perbaikil agi agar lebih efektif digunakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi atau antar Provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis, MOU yang sudah disepakati perlu ditindaklanjuti dengan Kerjasama Antar Daerah agar kegiatan yang akan dilaksanakan terealisasi dengan efektif.
2. Dalam pembangunan BUMD Pangan di daerah diperlukan dukungan yang kuat dari Kepala Daerah. Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, maka diperlukan pembentukan BUMD Pangan mengingat Peran BUMD pangan sangat penting sebagai *off taker* hasil pangan lokal, sehingga dapat menjaga pasokan serta harga di tingkat petani dan masyarakat.
3. Dalam pelaporan TPID Award, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi harus konsisten dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun. Selanjutnya, perlu memunculkan aspek inovasi dan digitalisasi dalam perumusan program unggulan.
4. Memperkuat peran dan fungsi TPID Provinsi Jambi sebagai media potensial dalam mengendalikan inflasi sepanjang Tahun 2024 dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, bekerjasama dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi serta instansi terkait dalam peningkatan produksi, efisiensi rantai tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana/prasaran penunjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;
- Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.
- Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah antisipai sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

Dalam jangka pendek :

1. Menyusun data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Bulog Provinsi

2.

Jambi dalam melaksanakan Operasi pasar dan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitasi harga bahan pokok pada bulan Januari s.d Desember 2024.

3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu terdampak inflasi. APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi, sehingga APBD harus tersalurkan tepat waktu termasuk pemberian bantuan sosial dan dana insentif lainnya.
5. Meningkatkan sinergi Pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi (Rakor) TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk tahun 2024, telah dilaksanakan GNPIP bersamaan dengan Pekan Nasional Qris di Hotel Aston Kota Jambi, antara lain dengan menggiatkan gerakan pemberian modal bagi pengusaha/UMKM yang bergerak dibidang budidaya cabai, timun, bawang merah, sawi, kangkung, kol dan lain-lain juga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).
6. Pemerintah kota/kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
7. Mengevaluasi Program Unggulan (output) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didukung oleh TPID Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sehingga secara efektif menjaga capaian inflasi pada level rendah dan stabil, tepat sasaran dalam menyelesaikan problem inflasi daerah serta berada pada track yang sesuai dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah.
8. TPID Provinsi Jambi dan instansi terkait terus mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan pada hari senin yang bertujuan untuk mengevaluasi komoditas yang menyumbang kenaikan inflasi dan mencari solusi terbaik.

Dalam jangka menengah/panjang :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi :
 - Monitoring dan evaluasi dan Pengawasan implementasi KAD agar tidak hanya berhenti dengan penandatangan MoU dan PKS.
 - Mendorong Fasilitasi Kerjasama secara Business to Business (B2B), tidak hanya Government to Government (G2G)
 - Mendorong peran BUMD Pangan dalam Pelaksanaan KAD, baik untuk pemenuhan kebutuhan di daerah maupun pendistribusian ke daerah lain.
1. Kebijakan *extra effort* masih dilanjutkan sampai akhir tahun 2024 guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran;
2. Tersedianya data merupakan hal yang strategis guna mendukung kebijakan pengendalian harga pangan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional sehingga perlu sinergi data dan informasi pangan antar lembaga dan/atau daerah yang mencakup harga, pasokan, dan jadwal panen;
3. Pemanfaatan data produksi pertanian sebagai identifikasi potensi KAD karena mayoritas produksi komoditas pangan masih terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat terutama Pulau Jawa, sehingga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan;
4. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan peta pangan strategis yang mengindikasikan

posisi surplus dan devisa Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi.

5. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah;
6. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;
7. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan
8. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga komoditas hortikultura dengan penyediaan mesin pengawet atau *cold storage*.